

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN AKUNTABILITAS, KOMITMEN ORGANISASI, DAN *POLITICAL BACKGROUND* SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 2014-2019)

Oleh :

Annisa Hapsari

Pembimbing : Nur Azlina dan Al azhar A

Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : annisahpsari@yahoo.com

The influence of the board knowledge about the budget on budget oversight with the accountability, organizational commitment, and political background as moderating variable. (Empirical Study of DPRD in Rokan Hilir period 2014-2019)

ABSTRACT

This research aims to test and prove empirically the influence of the board knowledge about the budget on budget oversight with the accountability, organizational commitment, and political background as moderating variable. The population is on DPRD located in Rokan Hilir regency in 2017. The sample used as the respondents was taken by using sensus sampling method. The Questionnaires was distributed to 45 respondents, which can be processed is 42 questionnaire. Data analysis techniques to test hypotheses using simple linear regression analysis and moderated regression analysis (MRA) with SPSS 21.0. The results of the tests show that the board knowledge about the budget has significant affect on budget oversight. And result also prove the relationship between the board knowledge about the budget with budget oversight are moderated by the accountability, organizational commitment, and political background.

Keywords : *Knowledge, Controlling, Accountability, Organizational Commitment, Political Background*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi pada Orde Reformasi memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara

mandiri, yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satu bagian dari reformasi adalah desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Adapun tujuan otonomi daerah adalah: (1) memberdayakan masyarakat, (2) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, (3) meningkatkan peran serta

masyarakat, (4) mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Huda, 2009: 69).

Fungsi yang dapat dilakukan oleh dewan salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan APBD. Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah agar berjalan sesuai dengan rencana, aturan, serta tujuan yang telah ditetapkan (Tarigan, 2002:147) dalam Kuddy (2016). Tujuan pengawasan tersebut lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin anggaran yang disusun benar-benar telah dijalankan sesuai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya melalui LKPj serta memperbaiki dan meluruskan penyimpangan yang kapan saja bisa terjadi.

Apabila fungsi pengawasan DPRD lemah dan tidak berjalan dengan baik akan membuka peluang bagi eksekutif dalam melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diamanatkan seperti terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terjadi kecurangan dan penyimpangan anggaran.

Fenomena yang ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir yaitu terjadinya penyimpangan pada dana APBD. Permasalahan yang timbul karena adanya ketidakkonsistenan antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaannya. Akibatnya terjadi penyalahgunaan anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar (DKPP) Pemkab Rohil dalam kegiatan pemeliharaan rutin berkala termasuk kendaraan dinas kebersihan (detik.com, 18 May 2016). Permasalahan lainnya adalah pada jalan lintas Bagansiapiapi – Simpang Poros Tugu Petani, kondisi jalan sangat rusak parah sejak 2014. Padahal untuk perawatan pada tahun anggaran 2015 dikabarkan sebesar Rp 30an miliar lebih dan meningkat setiap tahunnya mendekati 1 triliun bersumber

dari APBD Rohil. (Kompas riau, 21 April 2017). Dan Masih kurangnya akuntabilitas pelaporan keuangan di Rohil. Penilaian terhadap LAKIP Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2016 adalah C yaitu cukup. Selain itu terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD penyerapannya hanya 60% dan tercatat sudah 17 tahun Rohil namun Laporan Hasil Pemeriksaan selalu meraih WDP. (harianriau.co, 17/8/2016). Maka terlihat masih kurangnya pengawasan pada kabupaten Rohil ini.

Maka salah satu faktor untuk dapat meningkatkan pengawasan adalah pengetahuan dewan tentang anggaran. Utama (2015) menyebutkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pemahaman anggota DPRD tentang anggaran, mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan sampai tahap pertanggungjawaban.

Pengawasan APBD dapat dilakukan dengan baik apabila anggota dewan selaku pengawas mempunyai pengetahuan yang memadai tentang anggaran (Herbet et al. 1984:3; Newkirk, 2986:23; Peterson, 1994:55; Chong dan Chong, 2002; Yuen, 2007; serta Basri 2008). Pengetahuan ini juga berguna untuk mendeteksi terjadinya pemborosan ataupun kebocoran anggaran. Karena semakin luas pengetahuan dewan tentang anggaran, maka dewan tidak akan pasif menerima rancangan usulan anggaran serta laporan keterangan pertanggung jawaban dari pemerintah daerah.

Penelitian yang berkaitan dengan pengawasan APBD telah menguji berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dewan dalam melakukan pengawasan APBD. Pramono (2002) dalam Manginte, *et al* (2015) menjelaskan bahwa pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah

faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Salah satunya adalah pengetahuan dewan tentang anggaran, sedangkan faktor eksternal yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap fungsi pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan seperti akuntabilitas, komitmen organisasi, dan *political background*.

Pengawasan keuangan daerah juga tidak lepas dari hasil yang diinginkan oleh masyarakat nantinya yaitu berupa pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan anggaran. Terkait dengan pertanggungjawaban berarti berhubungan dengan adanya akuntabilitas yang berperan penting dalam pengawasan. Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi penyusunan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) (Kusumawati, 2014).

Selain itu komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik (Permatasari dan Kartika, 2015).

Serta *political background* menurut Rosita, dkk (2014) merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Seorang anggota dewan harus

mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan agar dapat mendukung menjalankan kinerjanya.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengetahuan yang di miliki dewan dalam melaksanakan pengawasan APBD. Dimana anggota dewan mempunyai latar belakang pendidikan, pengalaman politik dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga ketika mereka dipilih menjadi anggota dewan, keterbatasan ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dan dengan ketidakkonsistenan dari penelitian terdahulu membuat penulis tertarik dan termotivasi untuk meneliti kembali penelitian dari Widyarningsih (2012).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari periode masa jabatan DPRD serta terdapat perubahan peraturan pada penyajian LKPD dimana semula Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Dan penulis menambahkan variabel moderating komitmen organisasi dan *political background* dari penelitian Utami (2015) serta dengan objek yang berbeda. Pada penelitian terdahulu penelitiannya berada pada DPRD Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada DPRD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD serta apakah akuntabilitas, komitmen organisasi, *political background* dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD?

Berkaitan dengan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris: bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran akan mempengaruhi dewan dalam pengawasan APBD serta akuntabilitas, komitmen organisasi, *political background* dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

TELAAH PUSTAKA

Pengawasan APBD

Menurut Halim (2011:146), pengertian pengawasan keuangan daerah (APBD) dirumuskan sebagai berikut, Pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, pembelajaan pengeluaran-pengeluaran daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dilakukan mulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD (Mardiasmo, 2009:189).

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pemahaman anggota DPRD tentang anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan sampai tahap pertanggungjawaban. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat berhubungan dalam pengawasan keuangan daerah. Seorang anggota dewan harus mengetahui tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur tentang keuangan daerah (Nisa, 2016).

Menurut Kaho (2010:80-81), pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Mengingat demikian luasnya kegiatan pemerintahan maka adalah mutlak diperlukan aparatur pemerintahan, termasuk DPRD yang mempunyai kualitas yang tinggi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2013:169). Dalam hal ini pemegang amanah adalah DPRD dan pemberi amanah adalah masyarakat.

Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik diantaranya (Mardiasmo, 2009:21-22):

1. Akuntabilitas kebijakan
2. Akuntabilitas Program
3. Akuntabilitas Proses
4. Akuntabilitas Hukum dan Peradilan

Komitmen Organisasi

Menurut Pramita dan Andriani (2010) komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasinya dan mempunyai keinginan kuat untuk menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut. Griffin (2004: 15) juga mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sikap yang mencerminkan

sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya.

Political Background

Political Background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Ada tidaknya pengalaman di partai politik sebelum menjadi anggota dewan, jabatan di partai politik, ada tidaknya partai politik yang diikuti memberikan pengarahan tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab legislatif dengan baik dan benar (Kartikasari, 2012).

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Maka seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD

Yudono (2002) dalam Coryanata (2007) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta mampu menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah.

Dengan adanya pengetahuan dewan tentang anggaran akan memudahkan dewan dalam mengawasi eksekutif dan mengontrol kebijakan dalam keuangan daerah dimana dewan mampu menelusuri keseluruhan struktur, prosedur dan kebijakan tentang anggaran yang direncanakan tersebut serta mampu mendeteksi apabila

terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran.

H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

2. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating

Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2009:61). Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan. Maka dewan sebagai anggota legislatif dituntut untuk memiliki kapasitas SDM yang baik melalui pengetahuan, keahlian, serta pemahamannya mengenai pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi penyusunan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) (Kusumawati, 2014).

Maka semakin tinggi penyelenggaraan akuntabilitas atas pengelolaan APBD di daerah, hal tersebut akan diikuti pula dengan tuntutan peningkatan pengetahuan dewan terkait dengan aktivitas penganggaran sehingga akan meningkatkan kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

H2: Akuntabilitas memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

3. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating

Komitmen organisasi merupakan alat bantu psikologis dewan yang

bertujuan untuk memotivasi dewan dalam menjalankan kinerjanya dalam pengawasan APBD dengan berusaha memiliki pengetahuan yang maksimal. Kristina (2012) berkesimpulan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka akan memberi efek menambah pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Sehingga dengan komitmen yang tinggi dewan akan berusahanya semaksimal mungkin dalam pencapaian kinerjanya dalam melaksanakan fungsinya mengawasi anggaran dengan berusaha memiliki pengetahuan tentang anggaran yang cukup.

H3: Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

4. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD dengan *Political Background* Sebagai Variabel Moderating

Yudoyono (2000) dalam Rosita, dkk (2014) menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Maka dengan adanya *political background* seperti pengalaman dari partai politik, kualitas anggota dewan, serta karakteristik personal yang baik akan meningkatkan kinerjanya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD).

H4: Political background dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Anggota DPRD di Kabupaten Rokan Hilir. Metode pengambilan sampel menggunakan *sensus sampling*, maka jumlah responden dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota DPRD yang melaksanakan fungsi pengawasan di daerah Kabupaten Rokan Hilir periode 2014-2019 berjumlah 45 orang.

Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan sumber datanya adalah primer.

Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya Pengawasan APBD (Y)

Pengawasan APBD adalah pengawasan diperlukan pada setiap tahap, dikarenakan pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2001 dalam Widyaningsih, 2012).

Variabel ini diukur dengan 13 (tiga belas) pertanyaan dari penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003). Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengawasan APBD dengan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S= Setuju), 3 (TT= Tidak Tahu), 2 (TS= Tidak Setuju), 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X₁)

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran didefinisikan sebagai mengetahui tentang anggaran dan kemampuan yang dimiliki anggota dewan dalam menyusun (RAPBD/APBD) yang dijadikan sebagai dasar untuk dapat mendeteksi serta identifikasi terhadap keborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Yudono, 2002 dalam Widyaningsih, 2012).

Variabel ini diukur dengan 16 (enam belas) pertanyaan dan Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan ini mengacu kepada penelitian Paramita dan Andriyani (2010). Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengawasan APBD dengan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S= Setuju), 3 (TT= Tidak Tahu), 2 (TS= Tidak Setuju), 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Akuntabilitas (Z₁)

Menurut Mahsun (2013:169) akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban dari pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Variabel ini diukur dengan 7 (tujuh) pertanyaan dan Indikator-indikator dalam pengukuran variabel akuntabilitas mengacu pada penelitian Pramita dan Andriyani (2010). Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengawasan APBD dengan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S= Setuju), 3 (TT= Tidak Tahu), 2 (TS= Tidak Setuju), 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Komitmen Organisasi (Z₂)

Menurut Pramita dan Andriyani (2010) komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk

tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut.

Variabel ini diukur dengan 5 (lima) pertanyaan dan Indikator-indikator dalam pengukuran variabel akuntabilitas mengacu pada penelitian Yulinda devi Pramita dan Lilik Andriyani (2010). Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengawasan APBD dengan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S= Setuju), 3 (TT= Tidak Tahu), 2 (TS= Tidak Setuju), 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Political Background (Z₃)

Political Background didefinisikan sebagai sejarah atau keterangan yang ada apa diri seseorang didalam dunia politik yang terdiri dari beberapa dimensi seperti pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik, dan asal komisi (Winarna, 2007).

Variable kuesioner ini diukur dengan 8 (empat) pertanyaan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel political background mengacu pada penelitian Jaka Winarna dan Indah Sari (2007). Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengawasan APBD dengan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S= Setuju), 3 (TT= Tidak Tahu), 2 (TS= Tidak Setuju), 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan SPSS versi 21.0 Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z_1 + \beta_3 (X_1 Z_1) + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_4 Z_2 + \beta_5 (X_1 Z_2) + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_6 Z_3 + \beta_7 (X_1 Z_3) + e$$

Keterangan :

Y = Pengawasan APBD
 α = Konstanta
 $\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien regresi
 X = Pengetahuan dewan tentang anggaran
 $Z1$ = Akuntabilitas
 $Z2$ = Komitmen Organisasi
 $Z3$ = *Political Background*
 $X.Z1$ = Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas
 $X.Z2$ = Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi
 $X.Z3$ = Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan *political background*
 e = Standar error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif Statistik deskriptif merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian, dengan tujuannya yaitu memudahkan dalam memahami data dengan dimulai dari jumlah data (N), nilai rata-rata dan standar penyimpangan data (Standar Deviasi).

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Model	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Y	42	21	60	49,024	7,9495
X1	42	25	78	65,905	9,5810
Z1	42	21	35	27,548	3,9768
Z2	42	18	30	23,786	3,6193
Z3	42	24	40	33,214	4,2857
Valid N	42				

Sumber : Data Olah an 2018

Nilai rata-rata kelima variabel tersebut lebih besar daripada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukan bahwa bahwa penyebaran data sudah baik.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} semua variabel lebih

besar dibanding nilai r_{tabel} . Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

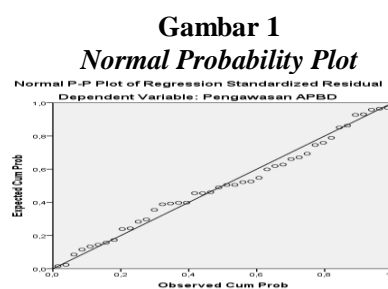
Hasil Uji Reabilitas

Hasil analisis data menunjukkan nilai *cronbach alpha* pada seluruh variabel lebih besar dari 0,80 sehingga data tersebut sangat reliabel, dan dapat dilanjutkan pada pengolahan berikutnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Data Olah an 2018

Berdasarkan Gambar 1, sebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Dari hasil perhitungan analisis data, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan *tolerance* $> 0,10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Sederhana dan Uji Interaksi (*Moderated Regression Analysis*)

Hasil Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD. Hasil uji interaksi persamaan pertama ditunjukkan dalam tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis Pertama

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,427	4,300		,332	,742
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	,722	,065	,870	11,182	,000

a. Dependent Variable: Pengawasan APBD
Sumber : Data Olahan 2018

Dari hasil perhitungan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 11,182 dengan signifikansi 0,000 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha / 2 = 42 - 5 - 1: 0,05 / 2 = 36 : 0,025 = \pm 2,028$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (11,182) > t_{tabel} (2,028)$ dan $Sig (0,000) < 0,05$. Jadi dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan APBD.

Hal tersebut dikarenakan evaluasi terhadap penyusunan dan penetapan perhitungan anggaran merupakan pertanggungjawaban dari DPRD, oleh sebab itu anggota dewan perlu untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang APBD untuk melaksanakan fungsinya selain sebagai legislasi dan budgeting adalah controlling. Sejalan dengan Yudono (2002) dalam Coryanata (2007)

menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta mampu menempatkan kedudukannya secara profesional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik, dan lain sebagainya.

Pengetahuan yang luas mengenai anggaran akan dapat membantu anggota dewan dalam mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga jika suatu daerah memiliki anggota dewan yang memiliki pendidikan dan pengalamannya cukup baik dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran maka secara langsung pengawasan APBD akan semakin maksimal dengan terciptanya keberhasilan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat banyak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Utama (2015); Manginte, *et al* (2016); Widyaningsih (2012); Sudiarta, dkk (2014); Ramdhani (2015); Utami (2015); Rosita, dkk (2014) dan Hartono (2016) menghasilkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Hasil Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan APBD. Hasil uji interaksi persamaan pertama ditunjukkan dalam tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis Kedua

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	127,643	34,931		3,654	,001

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	-.939	.518	-1,131	-1,810	.078
Akuntabilitas	-4,192	1,221	-2,097	-3,432	.001
X1Z1	.055	.018	1,790	2,981	.005

a. Dependent Variable: Pengawasan APBD
Sumber : Data Olahan 2018

Dari hasil perhitungan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,981 dengan signifikansi 0,005 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha / 2 = 42 - 5 - 1: 0,05 / 2 = 36 : 0,025 = \pm 2,028$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (2,981) > t_{tabel} (2,028)$ dan $Sig (0,005) < 0,05$. Jadi dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

Semakin tinggi penyelenggaraan akuntabilitas atas pengelolaan APBD di daerah, hal tersebut akan diikuti pula dengan tuntutan peningkatan pengetahuan dewan terkait dengan aktivitas penganggaran sehingga akan meningkatkan kinerja DPRD dalam pengawasan APBD.

Pada penelitian ini, anggota dewan Kabupaten Rokan Hilir hampir seluruhnya mengerti mengenai prosedur akuntabilitas akan tetapi ada beberapa yang belum mengetahui apa itu LAKIP bahkan ada yang belum pernah mendengar laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tetapi dari kondisi praktisnya yang peneliti amati terlihat langsung anggota dewan sangat berupaya mencari tahu dan bekerja semaksimal mungkin agar kinerjanya lebih baik serta sangat berhati-hati dalam menetapkan APBD dan juga melakukan evaluasi sesuai prosedur yang ditetapkan.

Dewan sebagai anggota legislatif sudah seharusnya mengerti dan memahami standar operasional prosedur akuntabilitas dalam menjalankan fungsinya mengawasi dari tahapan penyusunan hingga pelaporan pertanggungjawaban dari APBD salah satunya melihat dari LAKIP. Dimana dewan akan aktif dalam menerima laporan pertanggungjawaban dan menelaah keberhasilan atau kegagalan serta seberapa efektif dan efisien penggunaan dan penyerapan anggaran untuk kepentingan publik yang dilakukan DPRD untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan dapat dijadikan sebagai informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran berikutnya. Selain itu juga nantinya dijadikan umpan balik bagi eksekutif sebagai alat untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Pramita dan Andriyani (2010), Ramdhani (2014); Utami (2015); Arianti (2015) dan Sudiarta, dkk (2014) menghasilkan bahwa akuntabilitas dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

Hasil Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan APBD. Hasil uji interaksi persamaan pertama ditunjukkan dalam tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	105,519	41,291		2,555	.015

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Komitmen Organisasi	-,708	,616	-,854	-1,149	,258
X1Z2	4,061	1,669	-1,849	-2,433	,020
	,056	,025	1,626	2,210	,033

a. Dependent Variable: Pengawasan APBD

Sumber : Data Olahan 2018

Dari hasil perhitungan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,210 dengan signifikansi 0,033 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha / 2 = 42 - 5 - 1: 0,05 / 2 = 36 : 0,025 = \pm 2,028$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (2,210) > t_{tabel} (2,028)$ dan $Sig (0,033) < 0,05$. Jadi dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Gibson *et al.* (2009:315) yang menyatakan bahwa pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi berarti pegawai tersebut memiliki loyalitas terhadap organisasi dimana ia berada saat ini dan akan berupaya untuk berusaha dengan optimal mencapai tujuan organisasi tempat ia bekerja sebagaimana yang ditemukan dalam hasil penelitian ini. Dengan demikian, dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi pada badan legislatif diharapkan akan lebih meningkatkan peran dan fungsinya sebagai lembaga representatif masyarakat.

Dilihat dari penelitian serta wawancara pada anggota dewan di Kabupaten Rokan Hilir periode 2014-2019 mereka telah berusaha bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Dimana mereka melakukan kewajiban mereka sebagai pengawas anggaran seperti contohnya pada saat pengesahan anggaran. Mereka akan melakukan

penolakan terhadap anggaran jika tidak ada kesesuaian antara RKPD dan RAPBD.

Kemudian mengurangi/menambah/menghapus anggaran jika terjadi ketidaksesuaian. Dari hasil pengamatan juga bisa dilihat anggota dewan di tempat penelitian penulis lakukan telah melakukan kinerjanya sesuai ketentuan dan tidak ada unsur mementingkan hal bersifat pribadi. Selain itu hampir seluruh anggota dewan dapat hadir pada saat rapat paripurna dan hanya beberapa yang tidak dapat hadir karena kesibukan dan hal yang tidak dapat ditinggalkan.

Dapat dikatakan apabila anggota dewan yang berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka mereka berusaha mencari tahu hal baru yang berhubungan dengan anggaran dan mempelajarinya. Serta akan menggunakan seluruh pengetahuannya tentang anggaran tersebut untuk melakukan hal yang positif dan tidak menyimpang agar terciptanya pengawasan yang optimal untuk tercapainya pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Pramita dan Andriyani (2010); Ramdhani (2014); Astuti (2015) dan Hartono (2016) menghasilkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

Hasil Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh *political background* terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan APBD. Hasil uji interaksi persamaan pertama ditunjukkan dalam tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis Keempat

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

(Constant)	96,804	33,096		2,925	,006
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	,568	,496	-,684	1,145	,260
<i>Political Background</i>	-	1,009	-	-	,007
X1Z3	2,876	,039	1,551	2,852	,014

a. Dependent Variable: Pengawasan APBD
Sumber : Data Olahan 2018

Dari hasil perhitungan pada Tabel 5 atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,566 dengan signifikansi 0,014 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha / 2 = 42 - 5 - 1: 0,05 / 2 = 36 : 0,025 = \pm 2,028$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (2,566) > t_{tabel} (2,028)$ dan $Sig (0,014) < 0,05$. Jadi dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *political background* dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

Political background ini dapat memperkuat pengetahuannya apabila digunakan dengan baik dan positif. Semakin banyak pengalamannya di partai politik dan diberikan pelatihan serta mendapatkan banyak arahan mengenai anggaran dari partainya maka akan meningkat pula pengawasan oleh dewan.

Yudoyono (2000) dalam Rosita, dkk (2014) menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Sesuai dengan penelitian Rosita, dkk (2014) yang memberikan bukti bahwa *political background* dapat

meningkatkan peran DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan APBD. Dan penelitian Arianti (2016) menghasilkan *political background* dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) yang mengatakan bahwa *political background* sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase besarnya variasi nilai variabel independen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Variabel X1 dan Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,870 ^a	,758	,752	3,9622

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

b. Dependent Variable: Pengawasan APBD
Sumber : Data Olahan 2018

Dari Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,758. Artinya adalah bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD adalah sebesar 75,2 %. Sedangkan sisanya 24,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Variabel X1, Z1, dan Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,923 ^a	,853	,841	3,1706

a. Predictors: (Constant), X1Z1, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengawasan APBD
Sumber : Data Olahan 2018

Dari tabel 7 dapat diketahui nilai R square sebesar 0,853. Artinya adalah bahwa pengaruh akuntabilitas dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD adalah sebesar 84,1%. Sedangkan sisanya 15,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Variabel X1, Z2, dan Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,898 ^a	,806	,791	3,6356

- a. Predictors: (Constant), X1Z2, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Komitmen Organisasi
 b. Dependent Variable: Pengawasan APBD

Sumber : Data Olahan 2018

Dari tabel 8 dapat diketahui nilai R square sebesar 0,806. Artinya adalah bahwa pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD adalah sebesar 79,1%. Sedangkan sisanya 20,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Variabel X1, Z3, dan Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,904 ^a	,816	,802	3,5379

- a. Predictors: (Constant), X1Z3, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, *Political Background*
 b. Dependent Variable: Pengawasan APBD

Sumber : Data Olahan 2018

Dari tabel 9 dapat diketahui nilai R square sebesar 0,816. Artinya adalah bahwa pengaruh *political background* dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD adalah sebesar 80,2%. Sedangkan sisanya

19,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan APBD. Dan seluruh variabel moderating yaitu akuntabilitas, komitmen organisasi dan *political background* dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut diantaranya yaitu:

1. Ketidaktepatan waktu peneliti dengan responden saat meneliti dikarenakan jadwal serta tempat yang berbeda, karena itu beberapa kuesioner ditinggalkan untuk diisi oleh anggota DPRD lainnya. Sehingga penulis tidak dapat mendampingi anggota dewan satu persatu dalam pengisian kuesioner.
2. Mengingat kesibukan dari masing-masing anggota dewan sehingga penulis tidak dapat memberikan arahan saat anggota dewan ingin bertanya tentang maksud dari pernyataan kuesioner tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya yang sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar mewawancarai pada seluruh responden dalam upaya mengumpulkan data yang lebih akurat, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden yang tidak objektif dalam mengisi kuesioner.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup diperluas dan menambah responden yang terkait dalam mengikuti musrembang sehingga mungkin saja hasilnya berbeda dan tidak hanya melihat hasil penelitian dari satu pihak saja.
3. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen dan 3 variabel moderasi yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, komitmen organisasi dan *political background*. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel intervening atau faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pengawasan APBD dengan hasil yang diperoleh lebih akurat dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Lilik., Yulinda Devi Pramita. 2010. *“Determinasi Hubungan Anggota Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)”*. Jurnal SNA XIII.
- Coryanata, Isma. 2007. *“Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”*. Jurnal SNA X ASPP-06.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresil*. Edisi 7. Semarang: UNDIP.
- Halim, Abdul., Syam Kusufi, Muhammad. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah*. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irmadariyani, Ririn., Choyrun Nisa. 2016. *“Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)”*. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Cetakan kesepuluh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartikasari, Dewi. 2012. *“Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)”*. *Accounting Analysis Journal*, ISSN 2252-6765.
- Kuddy, Aprianto L. 2016. *“Gaya Kepemimpinan, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”*. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* ISSN 23355 – 6323. VOLUME

III, NOMOR 1 (APRIL 2016),
PP 1 – 18.

- Kusumawati, Eny. 2014. “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPRD Provinsi Jawa Tengah Dan DPRD Kabupaten Karanganyar). Seminar Nasional Dan Call For Paper ISBN: 978-602-70429-2-6.
- Mahsun, Moh., Sulistyowati, Firma., dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo., 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: ANDI, Jakarta.
- Rosita, Ni Made Ana. 2014. “Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan)”. e-Journal Volume 2 No. 1 Tahun 2014.
- Saraswati, Erwin., Shofia Yunus Manginte, Eko Ganis Sukoharsono. 2015. “Pengetahuan Anggaran serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Budaya Politik terhadap Pengawasan Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura)”. *Jurnal SNA XVIII*.
- Utama, Maulana Hardia. 2015. “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Boyolali)”. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Winarna, Jaka., Sri Murni. 2007. “Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah”. *Jurnal SNA X ASPP-11*.
- Widyaningsih, Aristanti. 2012. “Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating (Penelitian pada DPRD Kabupaten Sukabumi)”. *Jurnal Akuntansi ISSN 2088-2106*.